





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF

: PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LEMBAGA

UNIT KERJA : BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA

I. DATA PRIBADI

: AGUNG YUDHIARTO 1. Nama

: KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN LPSE 2. Jabatan

3. NHK : 421020

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN 250.000.000

Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/105 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

Tanah Seluas 1411 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

123.750.000 B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

MOBIL, ISUZU MPV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000

MOTOR, HONDA TIGER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	2.250.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	W. VOL
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.775.410
P F.	HARTA LAINNYA	Rp.	CPH CPH
	Sub Total	Rp.	393.775.410
III. HUTANG		Rp.	370.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	23.775.410

Catatan:





- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

